

**SISTEM AKUNTANSI DALAM PENDAPATAN KONSESI ATAS JASA
KEPELABUHANAN PADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
BELAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Ak)**



Oleh :

NAMA : AYU PRATIWI SINURAT
NPM : 1805170287
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

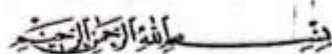
FAKULTAS EKONOMI DAN BINIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : AYU PRATIWI SINURAT
NPM : 1805170287
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : SISTEM AKUNTANSI DALAM PENDAPATAN
KONSESI ATAS JASA KEPELABUHANAN PADA
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
BELOWAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Irfan, SE., M.M.)

Tim Penguji

Penguji II

(Nabila Dwi Aginta, S.E., M.Sc.)

Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA, FAS)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624367 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : AYU PRATIWI SINURAT
N.P.M : 1805170287
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN KONSESI ATAS
JASA KEPELABUHANAN UTAMA BELAWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2025

Pembimbing Skripsi

PANDOPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZELIA HANUM, S.E., M.Si.

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Pratiwi Sinurat
NPM : 1805170287
Dosen Pembimbing : Pandopotan Ritonga, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Sistem Akuntansi dalam Pendapatan Konsesi atas Jasa Kepelabuhanan Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	keper bodong di pulau	10/7/2025	[Signature]
Bab 2	keper di amirka dgn variable pencatatan	11/7/2025	[Signature]
Bab 3	Defensi operasi di pulau	11/7/2025	[Signature]
Bab 4	di pulau ini ada 1 perusahaan buat flow chart	11/7/2025	[Signature]
Bab 5	keper di pulau	11/7/2025	[Signature]
Daftar Pustaka	Siti Dosen		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ass, 11/7/2025	11/7/2025	[Signature]

Medan, Juli 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. H. Zulfia Hanum, S.E., M.Si.

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Pandopotan Ritonga, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU PRATIWI SINURAT
N PM : 1805170157
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Sistem Akuntansi dalam Pendapatan Konsesi atas Jasa Kepelabuhanan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan" Adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



AYU PRATIWI SINURAT

ABSTRAK

SISTEM AKUNTANSI DALAM PENDAPATAN KONSESI ATAS JASA KEPELABUHANAN PADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN

AYU PRATIWI SINURAT

NPM : 1805170287

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapt. Mukthar Basr No. 3 Medan, 20238 Sumatera Utara, Indonesia

Email : Sinurat.ayu10@gmail.com

Permasalahan penelitian bagaimana sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan pada kantor otoritas pelabuhan utama belawan. Tujuan penelitian untuk menganalisis sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan pada kantor otoritas pelabuhan utama belawan. Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan dengan menganalisis kenyataan atau fakta yang ditemui di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang penulis dapatkan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowbal sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi secara langsung. Teknik analisis data metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan dengan menganalisis kenyataan atau fakta yang ditemui di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang penulis dapatkan. Temuan penelitian sistem akuntansi di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Sistem yang diterapkan telah mengadopsi teknologi digital, meskipun penerapannya belum sepenuhnya otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan pada integrasi sistem dan digitalisasi total. Selain itu, keberadaan SOP dan keterlibatan lintas bagian dalam proses pencatatan memperlihatkan bahwa instansi ini telah memiliki struktur kerja yang tertata.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Pendapatan Konsesi, Jasa Kepelabuhanan

ABSTRACT

ACCOUNTING SYSTEM FOR CONCESSION INCOME FROM PORT SERVICES AT THE BELAWAN MAIN PORT AUTHORITY OFFICE

AYU PRATIWI SINURAT

NPM : 1805170287

Faculty of Economics and Business

Muhammadiyah University of North Sumatra

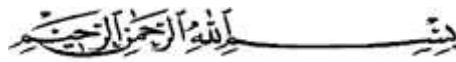
Jl. Kapt. Mukthar Basr No. 3 Medan, 20238 North Sumatra, Indonesia

Email: Sinurat.ayu10@gmail.com

The research problem is how the accounting system in port service concession revenue at the Belawan Main Port Authority Office. The purpose of the research is to analyze the accounting system in port service concession revenue at the Belawan Main Port Authority Office. The research method contains the type of qualitative analysis method research. This method is used by analyzing the reality or facts found in the field, then connecting them with the theories that the author has obtained. Sampling techniques in qualitative research sampling techniques that are often used are purposive sampling and snowball sampling. Purposive sampling is a technique for sampling data sources with certain considerations. Data collection techniques are by using interviews and direct observation. Data analysis techniques analysis methods used in this study are qualitative analysis methods. This method is used by analyzing the reality or facts found in the field, then connecting them with the theories that the author has obtained. Research findings indicate that the accounting system at the Belawan Main Port Authority Office aligns with the principles of public financial accountability and transparency. The system has adopted digital technology, although its implementation is not yet fully automated. This indicates that efforts to improve system integration and total digitization are still needed. Furthermore, the existence of standard operating procedures (SOPs) and cross-departmental involvement in the recording process demonstrate that this agency has an organized work structure.

Keywords: Accounting System, Concession Revenue, Port Services

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Sistem Akuntansi dalam Pendapatan Konsesi atas Jasa Kepelabuhanan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Praram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak putus dari keluarga.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas berkah,rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis dan yang teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Amir Husin Sinurat S.E dan Ibunda Nurlaili S.E, M.M yang telah memberikan segala doa, kasih sayang, perhatian, semangat dan pengorbanan baik secara materil dan immateril kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. H. Januri, S.E, M.M, M.Si, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E, M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Pandapotan Ritonga, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Ir. Andi Fiardi, M.T selaku Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.
10. Bapak Obet Soripada Siregar, S.E selaku Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum.

11. Nurlaili, S.E M.M selaku Kepala Seksi Bimbingan Usaha & Jasa Kepelabuhanan.

12. Seluruh Staff dan Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.

13. Kakak penulis tercinta, Wiwik Astuti Sinurat A.Md. yang tidak lelah memberikan semangat dan selalu menguatkan penulis. terima kasih banyak atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan kedepanya dan untuk penyempurnaaan skripsi ini dimasa yang akan datang, sehingga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat meberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Febuari 2025

Penulis

Ayu Pratiwi Sinurat
1805170287

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL viii	
DAFTAR GAMBAR ix	
DAFTAR LAMPIRAN x	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori	7
B. Penelitian Terdahulu.....	17
C. Kerangka Berpikir Konseptual	19
BAB III METODOLOGI	21
A. Metode Penelitian.....	21
B. Definisi Operasional.....	21

C.	Tempat dan waktu penelitian.....	22
D.	Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel	23
E.	Teknik pengumpulan data	25
F.	Teknik analisis data	25
G.	Sumber Dan Jenis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		27
4.1	Hasil Penelitian.....	27
4.1.1	Deskripsi Data.....	27
4.1.2	Analisis Data	33
4.2	Pembahasan	34
BAB V PENUTUP		41
5.1	Kesimpulan.....	41
5.2	Saran	42
5.3	Keterbatasan Penelitian	42
DAFTAR PUSTAKA.....		44
LAMPIRAN-LAMPIRAN		49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	2
Gambar 2.1.....	20
Gambar 4.1.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dapat disebut sebagai negara kelautan atau maritim. Ini terjadi karena memiliki wilayah perairan yang sangat luas, mencakup sekitar 3,25 juta km² dari total luas wilayahnya. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang sekitar 108.000 km, Indonesia menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Sebagai negara kelautan, Indonesia perlu untuk memiliki transportasi air. Transportasi air merupakan moda transportasi yang menggunakan perairan seperti sungai, danau, atau laut untuk mengangkut barang dan penumpang (Al Akbar et al. 2021). Jenis transportasi ini telah digunakan sejak zaman kuno dan tetap menjadi bagian penting dalam sistem transportasi global.

Transportasi air mencakup berbagai jenis kapal, seperti feri, kapal kargo, kapal pesiar, dan perahu tradisional. Keunggulan utama transportasi air adalah kapasitas muat yang besar dan efisiensi dalam pengangkutan barang dalam jumlah besar serta jarak jauh dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan moda transportasi darat atau udara (Dwiguna et al. 2024). Hal ini menyebabkan adanya peningkatan jumlah penumpang angkutan laut. BPS (2023) melaporkan jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri yang berangkat pada Agustus 2023 tercatat 1,7 juta orang atau turun 6,80 persen dibanding Juli 2023. Jumlah barang yang diangkut naik 2,06 persen menjadi 30,4 juta ton. Selama Januari–Agustus 2023, jumlah penumpang mencapai

13,2 juta orang atau naik 11,81 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2022, sementara jumlah barang yang diangkut naik 9,78 persen atau mencapai 230,7 juta ton.

Gambar 1.1 Jumlah Penumpang Angkutan Laut



Sumber: BPS, 2023

Pelabuhan merupakan infrastruktur vital dalam sistem transportasi air. Pelabuhan seringkali berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang serta persinggahan kapal penumpang dan kargo (Anjani, D. N., & Rofi'ah, 2024). Pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian suatu negara, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang mengandalkan jalur laut sebagai koneksi utama antarwilayah. Indonesai dalam laman resminya melansir jumlah pelabuhan di Indonesia pada 2022 sebanyak 3.672 dari total keseluruhan pelabuhan dan terminal. Hal ini menjadi informasi yang baik karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara dari aktivitas ekspor dan impor. Negara dapat menerima pendapatan konsensi dari sektor perhubungan laut.

Pendapatan konsesi dar jasa kepelabuhanan di Indonesia merupakan sumber penting bagi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor

perhubungan laut (Surur et al. 2022). Namun, masih terdapat tantangan terkait pelaporan pendapatan konsesi oleh beberapa pelabuhan. Salah satunya di pelabuhan Utama Belawan yang masih belum secara konsisten melaporkan pendapatan konsesinya. Ini dapat memengaruhi akurasi perhitungan PNBPN dan perencanaan anggaran negara. Misalnya, dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat indikasi bahwa beberapa pelabuhan belum memenuhi kewajiban pelaporan pendapatan konsesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem pelaporan dan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan konsesi di sektor kepelabuhanan.

Fenomena diatas menunjukkan belum optimalnya pendapatan konsensi dalam sektor Pelabuhan. Ini dapat berakibat pada pendapatan negara. Sehingga perlu adanya sistem akuntansi untuk membantu penulisan pendapatan konsensi jasa khususnya di Pelabuhan utama Belawan. Sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa merujuk pada prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan pendapatan yang diterima oleh pemberi konsesi atau badan usaha terkait dalam perjanjian konsesi jasa. Pendapatan konsesi jasa dalam akuntansi dapat mencakup biaya penggunaan fasilitas, pembayaran berbasis kinerja, atau pembayaran tetap yang diterima oleh pemberi konsesi. Sistem akuntansi ini harus mengacu pada standar akuntansi yang relevan.

Darmawan, R., & Simorangkir, P. (2022), memaparkan bahwa sistem akuntansi sistemik atas perjanjian konsesi jasa telah diatur dalam ISAK 16

yang umumnya diikuti oleh badan usaha atau mitra usaha, berdasarkan berbagai aspek yang diuraikan dalam standar tersebut. Akan tetapi, ISAK 16 tidak membahas prinsip-prinsip akuntansi untuk badan usaha pemerintah. Untuk mendorong kerja sama yang efektif antara pemerintah dan mitra usaha dengan interpretasi yang konsisten, pemerintah menerbitkan PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa Pemegang Konsesi. PSAP 16 diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 1 PSAP 16, standar ini melengkapi Interpretasi SAK 16 Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI yang menguraikan perlakuan akuntansi atas konsesi dari perspektif pemegang konsesi.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Nasution, R. P. S. (2021), yang mengkaji analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung. Darmawan, R., & Simorangkir, P. (2022), juga mengkaji Implementasi psap 16 tentang perjanjian konsesi jasa–pemberi konsesi kepelabuhanan studi kasus pada kantor otoritas pelabuhan utama tanjung priok. Selain itu, Apriella, I. (2021), juga mengkaji analisis pengelolaan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan sehingga hal tersebut menjadi gap atau celah dalam penelitian ini. Objek penelitian ini adalah kantor otoritas pelabuhan utama belawan sebagai kebaruan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul
“Sistem Akuntansi Dalam Pendapatan Konsesi Jasa Kepelabuhanan Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan pada kantor otoritas pelabuhan utama belawan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan pada kantor otoritas pelabuhan utama belawan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan menganalisis sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan pada kantor otoritas pelabuhan utama belawan.

B. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu akuntansi dalam kaitannya pada Sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan pada kantor otoritas pelabuhan utama belawan.

C. Bagi Instansi

Sebagai masukan bagi instansi terkait untuk mempertimbangkan beberapa variabel atau faktor penting terkait Sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan pada kantor otoritas pelabuhan utama belawan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan pada kantor otoritas pelabuhan utama belawan. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam kebutuhan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Konsensi

Definisi konsesi pelabuhan adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu (PP No 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Pasal 1 No 30).

Konsesi merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum yang mana pekerjaan tersebut merupakan tugas pemerintah tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraan kepada konsesisionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.

Di dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2003).

Izin menurut Prof. Bagir Manan merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin khusus yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :

- a. Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratoir, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
- b. Linsesi adalah izin untuk melakukn suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
- c. Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, ijin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas dapat menimbulkan masalah pilitik dan social yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampung, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana laiannya.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan A.M. Donner seperti dikutip Amrah Muslimin yang mengemukakan perizinan (*vergunningen*) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori, yakni lisensi, dispensasi, dan konsesi.

Pembedaan perizinan dengan izin secara normatif ditemukan pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 25 Tahun 2000, dimana izin ditetapkan sebagai bagian perizinan yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha dan atau kegiatan. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Van Praag dalam bukunya yang berjudul “*Algemeen Nederlands Administratief Recht*” mengemukakan bentukbentuk persetujuan untuk melakukan sesuatu dari Pemerintah dapat berupa izin, persetujuan, pemberian kuasa, konsesi, dispensasi, pembebasan dari hukuman pembebasan dari kewajiban dan sebagainya (*De hier bedoelde vormen worde aangeduid onder verschillende benamingen, zoal vergunning, verlof, machtiging, concessie, dispensatie, vrijstelling, onthffing, etc*)

Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Van der Pot yang membedakan perizinan dalam 3 (tiga) klasifikasi yakni :

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
- b. Izin (*verguuning*) adalah bila pembuat peraturan tidak umumnya melarang perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret,

maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

- c. Konsesi adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang penting bagi umum yang ditetapkan dengan turut campurnya dari pemerintah

Konsesi, setelah mengidentifikasi kebutuhan fasilitas, pemerintah, memberikan konsesi kepada pemilik konsesi. Pemegang konsesi mengambil tanggungjawab pengembangan (merancang, pembiayaan dan membangun), memelihara dan mengoperasikan fasilitas, atas nama principal. Para pemegang konsesi adalah pemilik fasilitas selama masa konsesi dan menyadari keuntungan dari investasi awal melalui penggunaan fasilitas.

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge yang disunting Philipus M.Hadjon mengemukakan perizinan untuk izin dalam arti luas, sedangkan izin dalam arti sempit disebut “izin” saja. membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut (I Made, 1993):

- a. Izin dalam arti luas (perizinan) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.
- b. Sedangkan izin dalam arti sempit disebut izin saja. Izin dalam arti sempit dibedakan dengan bentuk-bentuk perizinan lainnya seperti dispensasi, konsesi, rekomendasi, tanda daftar, surat persetujuan dan pendaftaran.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan A.M. Donner seperti dikutip Amrah Muslimin yang mengemukakan perizinan (vergunningen) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori, yakni lisensi, dispensasi, dan konsesi. Perbedaan perizinan dengan izin secara normatif ditemukan pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 25 Tahun 2000, dimana izin ditetapkan sebagai bagian perizinan yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pandangan ini juga dikemukakan oleh Van Praag (1950) dalam bukunya yang berjudul “ Algemeen Nederlands Administratief Recht” mengemukakan bentuk-bentuk persetujuan untuk melakukan sesuatu dari Pemerintah dapat berupa izin, persetujuan, pemberian kuasa, konsesi, dispensasi, pembebasan dari hukuman pembebasan dari kewajiban dan sebagainya (De hier bedoelde vormen worde aangeduid onder verschillende benamingen, zoal vergunning, verlof, machtiging, concessie, dispensatie, vrijstelling, onthffing, etc)

2. Konsesi Pelabuhan

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (PP No 69 Tahun 2011 tentang Kepelabuhanan) dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi oleh pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan (UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 82 ayat 4) untuk kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
- g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
- h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
- i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian dan dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu konsesi disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar. Perjanjian konsesi ini paling sedikit memuat:

- a. Lingkup perusahaan;
- b. Masa konsesi perusahaan;

- c. Tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
- d. Hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
- e. Standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
- f. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusaha;
- g. Penyelesaian sengketa;
- h. Pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusaha;
- i. Sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusaha adalah hukum indonesia;
- j. Keadaan kahar; dan
- k. Perubahan-perubahan.

Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan. Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan pengelolaannya diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme pelelangan. Kerjasama pemanfaatan diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani.

Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh Otoritas Pelabuhan merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan pencabutan konsesi serta kerjasama diatur dengan Peraturan Menteri

Sesuai dengan Undang Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008 Pasal 344 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2011 tentang Kepelabuhanan ketentuan peralihan pasal 165 bahwa pada ada saat Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan perusahaan di pelabuhan berdasarkan Undang-Undang ini dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang - Undang ini berlaku, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kegiatan perusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud. Perjanjian atau kerja sama di dalam Daerah Lingkungan Kerja antara Badan Usaha Milik Negara yang telah menyelenggarakan usaha pelabuhan dengan pihak ketiga tetap berlaku.

3. Kantor Otoritas Pelabuhan

Kantor Otoritas Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus limbah bahan berbahaya dan beracun, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran.
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dipelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang dipelabuhan
- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan.
- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan
- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

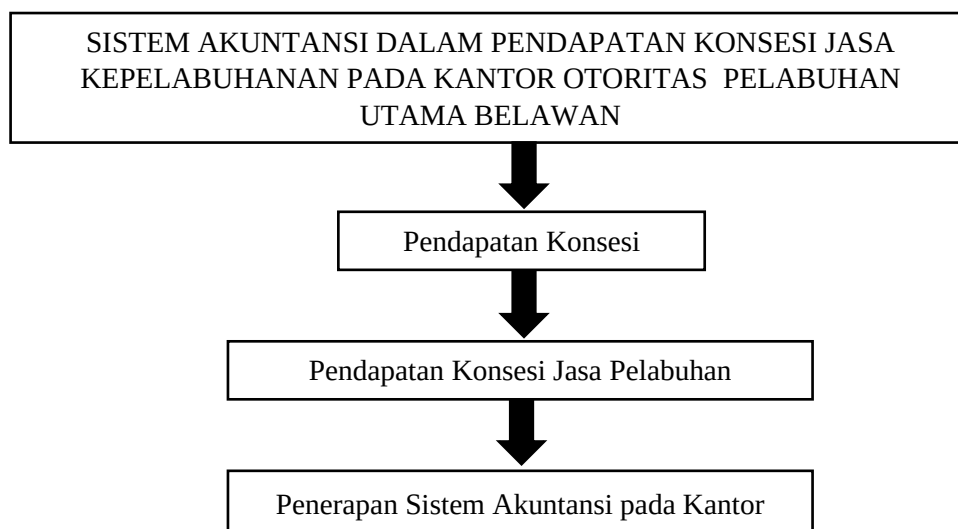
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
Riyan Darmawan dan Panubut Simorangkir (2022)	Pelaksanaan Psap 16 Tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi Kepelabuhananan Studi Kasus Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	Deskriptif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyajian dan pengungkapan PSAP 16 dalam perjanjian konsesi yang ada telah terpenuhi sesuai dengan pedoman namun masih terdapat poin-poin yang belum sepenuhnya dituangkan dalam perjanjian.
Amrie Firmansyah dan Sony Indra Baskoro (2020)	Akuntansi Hak Konsesi sebagai Aset Tak Berwujud pada Perusahaan Penyedia Jasa Jalan Tol di Indonesia	Deskriptif	Penerapan akuntansi atas hak konsesi jalan tol sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan penyebaran akuntansi atas hak konsesi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan yang menyelenggarakan hak konsesi jalan tol bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Regina Puti Jihan Prameswari (2024)	Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk Transaksi Perjanjian Konsesi Jasa (Studi pada PT	Deskriptif	Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi untuk akun pendapatan operasi, aset tidak berwujud,

Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	Jasamarga Bali Tol)		dan kewajiban diestimasi pada proyek jalan tol PT Jasamarga Bali Tol dengan ISAK 112, ISAK 229, dan SAK terkait lainnya. Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran atas ketiga akun tersebut telah sesuai dengan ISAK 112 tetapi pengungkapan yang dianalisis dengan ISAK 229 masih membutuhkan penyempurnaan.
Gusnidar Suryam (2023)	Kewajiban pengalihan aset dalam perjanjian konsesi Tentang kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan (PT. Pelabuhan Indonesia)	Deskriptif	Menunjukkan bahwa kedua pihak telah bersepakat untuk tidak mengalihkan asetnya. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak dan berlaku asas kekuatan mengikatnya perjanjian atau dikenal dengan Pacta Sunt Servanda bahwa setiap orang yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut.
Seprida Hanum (2017)	Pemanfaatan aplikasi penggambar diagram alir (flowchart) sebagai bahanajar untuk mata kuliah sistem akuntansi	Deskriptif	Pemanfaatan Aplikasi Penggambar Diagram Alir (Flowchart) sebagai Bahan Ajar untuk Mata Kuliah Sistem Akuntansi di Fakultas Ekonomi. Diagram alir

Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	di fakultas ekonomi pada perguruan tinggi swasta di kota medan		biasanya diperkenalkan dengan menggunakan papan tulis yang digambar oleh dosen atau melalui buku pegangan. Selain itu, dosen memperkenalkan aplikasi ini dengan menggunakan aplikasi presentase Microsoft Power Point dimana tidak begitu banyak model-model bagan dari flowchart yang diperkenalkan

C. Kerangka Berpikir Konseptual



Gambar 2.1

BAB III

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Uma dan Roger (2017) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data/informasi yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara langsung. Hal yang paling penting suatu barang atau jasa adalah kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah arti dari kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Sedangkan pendekatan yang dipakai berupa deskriptif.

Pendekatan deskriptif adalah analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

B. Definisi Operasional

1. Sistem, merupakan kumpulan sebuah sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan bekerja secara bersama-sama dalam mengolah dan menghasilkan data yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.
2. Sistem akuntansi merupakan kumpulan prosedur dan metode yang dirancang untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan

informasi yang akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan manajerial.

3. Pendapatan adalah jumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima oleh perusahaan sebagai hasil dari aktivitas operasionalnya, seperti penjualan barang atau jasa. Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, tidak termasuk kontribusi dari pemilik
4. Koneksi merupakan perjanjian yang secara hukum mengikat antara pemerintah dan mitra, di mana pemerintah memberikan izin kepada mitra untuk menggunakan aset publik untuk tujuan tertentu, seperti penyediaan infrastruktur atau layanan publik.

C. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan yang beralamat di Jl. Deli, Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara (20411) yang bergerak dalam bidang Kepelabuhan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan oleh penulis adalah pada bulan Januari 2025 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025				April 2025				Mei 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Penyusunan Proposal																				
3.	Bimbingan Proposal																				
4.	Seminar Proposal																				
5.	Penyusunan Skripsi																				
6.	Bimbingan Skripsi																				
7.	Sidang Meja Hijau																				

D. Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang nonkualitatif (Moleong, 2012). Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Moleong, 2012).

Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih

mengarah ke penelitian proses daripada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus (Muhajir, 1996).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan *snowball* sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2011). Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat penelitian mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap (Sugiyono, 2011).

E. Teknik pengumpulan data

Dalam Pengumpulan data, peneliti dapat mengumpulkan berbagai teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dilakukan secara mendalam dan membuat pertanyaan langsung dengan pihak yang terlibat di dalam memberikan informasi sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi. yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil secara langsung pada perusahaan dengan mengadakan wawancara kepada pihak yang berwenang mengenai objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara langsung kepada pegawai bagian keuangan.
2. Dokumentasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa dokumen atau arsip yang bisa memberikan informasi tentang pengamatan sistem informasi sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi.
3. Pengamatan dilakukan dengan mengamati, observasi, dan menganalisis secara langsung proses yang terjadi di dalam menerapkan kegiatan sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi Jasa Kepelabuhanan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan
4. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai informasi dari buku, referensi, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan sistem informasi sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi.

F. Teknik analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan dengan menganalisis kenyataan atau fakta yang

ditemui di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang penulis dapatkan. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dari objek penelitian yaitu di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dan dokumentasi data.
2. Menganalisa/Mengevaluasi Bagaimana Sistem Akuntansi Dalam Pendapatan Konsesi Jasa Kepelabuhanan Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan

G. Sumber Dan Jenis Data

Di dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau pelaku atau pelaku yang menjadi subjek. Dan dalam penelitian ini seperti wawancara yang dibuat tentang pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan pada kantor otoritas pelabuhan utama belawan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui data dan informasi dari pembaca, karya ilmiah, dokumen-dokumen instansi yang erat dengan penelitian. Dan dalam penelitian ini seperti dokumen-dokumen yang ada di kantor otoritas pelabuhan utama belawan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan Ibu Nurlaili, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Bimbingan Usaha & Jasa Kepelabuhanan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan pendapatan konsesi, proses pencatatan, prosedur kerja, serta pemahaman mengenai perjanjian konsesi yang berlaku di instansi tersebut. Informasi diperoleh melalui daftar pertanyaan terstruktur, yang mencakup empat aspek utama, yakni sistem akuntansi, jenis pendapatan konsesi, prosedur pencatatan, serta aspek pengawasan konsesi. Terkait **sistem akuntansi**, narasumber menjelaskan bahwa sistem yang digunakan telah menerapkan basis akrual dan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.

Narasumber menyampaikan terkait pertanyaan berikut ini:

Bagaimana sistem akuntansi diterapkan dalam pengelolaan pendapatan konsesi di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan?

“Jadi, sistem akuntansi yang kita pakai udah pakai metode akrual dan ngikutin aturan dari pemerintah. Semua catatan

keuangan, khususnya soal pendapatan konsesi, dicatat sesuai prosedur dan disesuaikan sama sistem dari pusat. Intinya biar rapi, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.” (ucap narasumber)

Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dalam hal komponen sistem, ia menjelaskan jawaban dari pertanyaan terkait apa saja komponen utama dalam sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari konsesi jasa kepelabuhanan :

“Ada beberapa bagian penting nih, mulai dari catatan pendapatan, piutang, proses tagihan, sampai penyetoran ke kas negara. Semua itu dilengkapi juga sama dokumen pendukung kayak laporan aktivitas mitra dan bukti setor.”

Sistem akuntansi yang digunakan juga sudah berbasis digital, meskipun masih ada unsur manual yang tersisa. Menurut narasumber:

Apakah sistem yang digunakan saat ini sudah terintegrasi secara digital atau masih manual? Mohon dijelaskan.

“Udah digital kok, kita pakai beberapa aplikasi dari Kemenhub kayak SIMLALA dan SIMKAPEL. Tapi ya, kadang masih ada juga yang semi manual, apalagi kalau nyangkut dokumen fisik dari mitra yang harus dicek dulu.”

Namun demikian, sistem ini dianggap sangat mendukung pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan karena data yang ada sudah bisa langsung diakses dan diproses dengan lebih efisien.

Sejauh mana sistem ini membantu pihak keuangan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan? Dari pertanyaan tersebut narasumber menyatakan:

“Bantu banget. Soalnya data bisa langsung dicek dan diolah. Jadi kalau tim keuangan butuh laporan atau mau ambil keputusan, semuanya udah ada datanya dan lebih cepat prosesnya.”

Dalam aspek pendapatan konsesi, narasumber menjelaskan bahwa pendapatan berasal dari berbagai kegiatan usaha oleh pihak ketiga yang beroperasi di wilayah pelabuhan. Hal ini meliputi pemanfaatan lahan, penggunaan fasilitas pelabuhan, hingga pengelolaan terminal dan kegiatan bongkar muat. Kemudian untuk pertanyaan *apa saja jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori pendapatan konsesi di kantor ini?*

Ia menyebutkan:

“Pendapatan konsesi itu datang dari berbagai aktivitas usaha di pelabuhan, misalnya penggunaan lahan, fasilitas pelabuhan, terminal penumpang, sampai peti kemas. Pokoknya semua yang dikelola pihak ketiga tapi di bawah pengawasan kita.”

Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan pendapatan konsesi dilakukan? Narasumber menguraikan proses tersebut:

“Pertama, mitra kasih laporan, kita verifikasi, terus kita tagih dan setelah dibayar, langsung dicatat. Setelah itu dimasukan ke sistem dan dilaporkan rutin, biasanya setiap triwulan dan tahunan.”

Apakah terdapat tantangan atau hambatan dalam pencatatan dan pelaporan pendapatan konsesi? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?, kemudian narasumber menjelaskan bahwa :

“Tantangannya tuh biasanya mitra lambat ngasih laporan atau dokumennya kurang lengkap. Tapi kita biasanya pendekatan baik-baik aja, dikasih pengertian dan juga edukasi biar ke depannya lebih tertib.”

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pencatatan pendapatan konsesi?. Ia menyatakan:

“Yang terlibat ada dari seksi kami, staf teknis, bagian keuangan, sampai auditor internal. Jadi memang dikerjain bareng-bareng supaya datanya valid.”

Bagaimana alur kerja dari pendapatan konsesi mulai dari diterima hingga dicatat dalam laporan keuangan? Narasumber menjelaskan:

“Alurnya gini: mitra setor laporan , kita cek , kita tagih , setelah dibayar , dicatat , dimasukin ke sistem , lalu dibuat laporannya. Runtut dan bertahap.”

Apakah ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pencatatan pendapatan konsesi?

“Jelas ada. SOP-nya dari Direktorat Jenderal, dan kita juga sesuaikan sama kondisi di lapangan. Biar semua kerja sesuai aturan.”

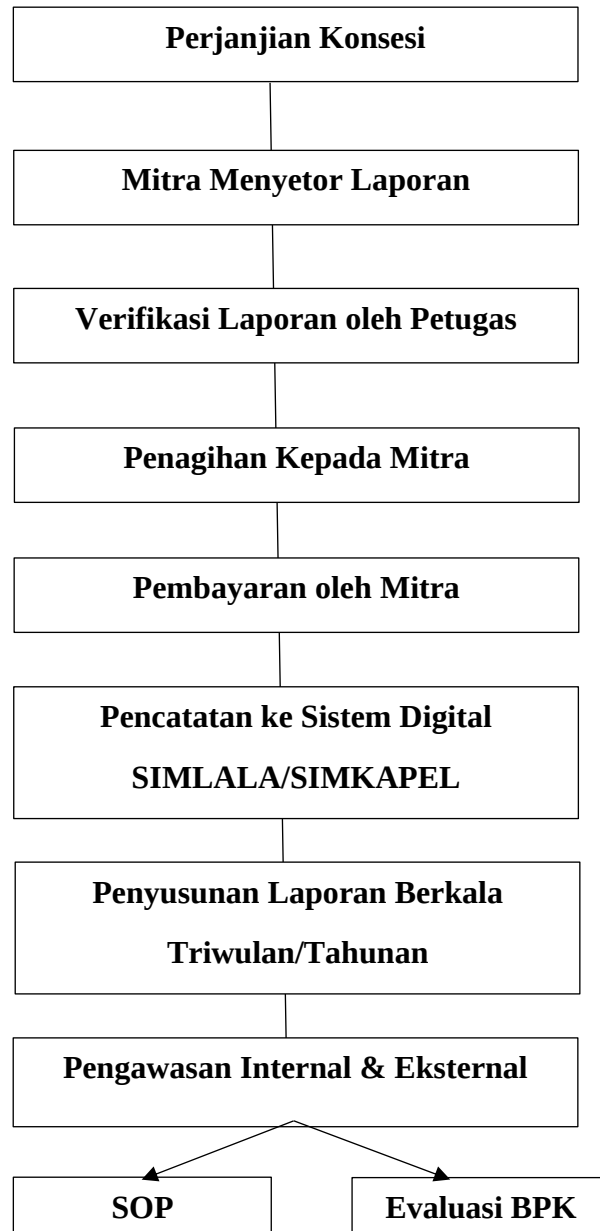
Apa pengertian konsesi menurut pandangan instansi dan bagaimana perjanjian konsesi dibuat? Kemudian narasumber menjawab:

“Konsesi tuh kayak kerja sama, di mana pihak ketiga dikasih izin buat kelola aset atau layanan pelabuhan dengan ketentuan yang jelas. Perjanjiannya resmi dan diatur lewat regulasi. Jadi gak asal-asalan, ada tahapan dan proses evaluasinya dulu.”

Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penerimaan konsesi?. Menurut narasumber:

“Tanggung jawab utamanya sih Kepala Kantor, tapi yang sehari-hari ngawasin ya tim kami, dibantu juga sama keuangan dan tim pengawas lainnya. Evaluasinya juga rutin kok, bahkan ada juga dari pihak eksternal seperti BPK.”

Gambar 4.1



Alur pengelolaan pendapatan konsesi dimulai dari perjanjian resmi antara instansi dan pihak ketiga, yang disusun berdasarkan regulasi. Mitra usaha menyampaikan laporan kegiatan, lalu diverifikasi oleh staf teknis sebelum dilakukan penagihan dan pembayaran. Data keuangan kemudian dicatat ke dalam sistem digital seperti SIMLALA dan SIMKAPEL, dan dilaporkan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas.

Seluruh proses ini diawasi oleh tim internal dan eksternal seperti BPK, serta dijalankan sesuai SOP yang berlaku.

4.1.2 Analisis Data

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Sistem yang diterapkan telah mengadopsi teknologi digital, meskipun penerapannya belum sepenuhnya otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan pada integrasi sistem dan digitalisasi total. Selain itu, keberadaan SOP dan keterlibatan lintas bagian dalam proses pencatatan memperlihatkan bahwa instansi ini telah memiliki struktur kerja yang tertata.

Dari segi pendapatan konsesi, proses pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan metode yang berjenjang dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Meski ada tantangan berupa keterlambatan laporan mitra, pendekatan komunikatif dan edukatif yang digunakan instansi menunjukkan bahwa aspek hubungan kelembagaan tetap dijaga. Dengan alur kerja yang sistematis serta pengawasan internal dan eksternal yang berlapis, dapat disimpulkan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan telah menjalankan fungsi pengelolaan pendapatan konsesi secara profesional dan sesuai regulasi.

4.2 Pembahasan

Sistem akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan pendapatan konsesi di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan menunjukkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang selaras dengan kebijakan nasional, khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam praktiknya, sistem ini meliputi pencatatan pendapatan, piutang dari mitra, proses penagihan, hingga penyetoran ke kas negara yang dilengkapi oleh dokumen pendukung seperti laporan aktivitas mitra dan bukti pembayaran. Penerapan metode akrual menjadi indikator bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan telah memahami pentingnya pencatatan pendapatan secara tepat waktu dan akurat, yang menjadi dasar dalam pelaporan dan pengambilan keputusan keuangan.

Secara umum, sistem akuntansi yang diterapkan telah berbasis digital menggunakan aplikasi seperti SIMLALA dan SIMKAPEL dari Kementerian Perhubungan, yang berfungsi untuk mencatat dan mengelola data transaksi konsesi jasa kepelabuhanan secara lebih sistematis. Digitalisasi sistem ini telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaporan, sekaligus mempercepat proses analisis keuangan internal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat proses semi-manual, terutama pada tahap awal verifikasi dokumen fisik dari mitra. Hal ini menjadi tantangan yang menandakan perlunya peningkatan integrasi sistem informasi agar semua tahap pencatatan dan verifikasi bisa dilakukan secara menyeluruh secara digital.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Seprida Hanum (2017) yang menekankan bahwa pemanfaatan sistem visual seperti diagram alir dan aplikasi

digital dalam sistem akuntansi dapat meningkatkan pemahaman, efisiensi kerja, dan akurasi pencatatan transaksi. Keterlibatan berbagai aplikasi pendukung dalam proses pencatatan konsesi di Belawan mencerminkan bahwa pendekatan teknologi sudah digunakan, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Dalam hal tata kelola akuntansi pendapatan konsesi, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pencatatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari penerimaan laporan dari mitra, verifikasi dokumen, penagihan, pencatatan pembayaran, hingga pelaporan ke tingkat pusat. Prosedur ini mencerminkan prinsip prudence (kehati-hatian) dalam akuntansi, yaitu memastikan bahwa pendapatan yang dicatat benar-benar telah diterima dan tervalidasi. Alur kerja ini telah diformalkan melalui SOP (Standard Operating Procedure) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan. Prosedur yang tertata ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi telah menjadi prioritas dalam tata kelola keuangan negara di lingkungan pelabuhan.

Dari perspektif regulasi dan standar, pengelolaan pendapatan konsesi di pelabuhan ini juga menunjukkan kesesuaian dengan PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa. Hasil penelitian Riyan Darmawan dan Panubut Simorangkir (2022) pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menunjukkan bahwa secara umum penyajian dan pengungkapan perjanjian konsesi sudah sesuai dengan PSAP 16, meskipun terdapat poin-poin yang belum sepenuhnya dituangkan dalam perjanjian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik di lingkungan otoritas pelabuhan, implementasi standar akuntansi memerlukan penguatan dalam aspek dokumentasi dan penjabaran substansi perjanjian secara rinci.

Selain itu, aspek pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian konsesi juga menjadi bagian integral dari sistem akuntansi pendapatan. Pengawasan dilakukan tidak hanya oleh internal (staf teknis, auditor, kepala seksi), tetapi juga oleh pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini sejalan dengan prinsip Pacta Sunt Servanda sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Gusnidar Suryam (2023), yang menyatakan bahwa perjanjian konsesi memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dijalankan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, aspek dokumentasi dan pengawasan tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga secara hukum.

Lebih lanjut, pendekatan yang digunakan oleh pihak Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dalam mengatasi keterlambatan laporan dari mitra menunjukkan adanya penerapan manajemen hubungan kelembagaan yang bersifat persuasif dan edukatif. Strategi ini tidak hanya mendukung efektivitas pencatatan pendapatan, tetapi juga mencerminkan prinsip tata kelola kelembagaan yang kolaboratif. Hal ini senada dengan temuan dalam penelitian Amrie Firmansyah dan Sony Indra Baskoro (2020) yang menegaskan bahwa penyajian informasi yang akurat dan sistematis dalam akuntansi konsesi sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan pengelolaan konsesi di sektor jalan tol seperti yang dikaji dalam penelitian Regina Puti Jihan Prameswari (2024), terlihat bahwa aspek pengakuan dan pengukuran pendapatan konsesi di pelabuhan telah sesuai dengan prinsip ISAK 112. Namun, sebagaimana disimpulkan dalam penelitian Regina, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan memerlukan penyempurnaan agar dapat memenuhi ISAK 229 dan SAK terkait lainnya. Ini

memberikan gambaran bahwa baik di sektor jalan tol maupun pelabuhan, pengelolaan konsesi masih memiliki tantangan dalam hal pengungkapan (disclosure) yang lebih rinci, transparan, dan sesuai standar internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi dalam pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan telah menerapkan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku, mengacu pada standar nasional dan peraturan teknis yang berlaku. Penerapan sistem digital, prosedur berjenjang, pengawasan berlapis, dan pendekatan kelembagaan yang kolaboratif menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan keuangan di lingkungan pelabuhan. Namun, terdapat beberapa catatan penting seperti perlunya digitalisasi penuh, penyempurnaan pengungkapan perjanjian, serta peningkatan kapasitas pengawasan internal yang perlu menjadi perhatian ke depan.

Dalam konteks teori perizinan dan konsesi, sistem akuntansi pendapatan konsesi di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan sejalan dengan pengertian konsesi sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan dan Van der Pot, yakni sebagai bentuk izin khusus (*vergunning*) yang diberikan oleh negara kepada pihak swasta untuk menyelenggarakan pelayanan yang penting bagi umum. Konsesi di pelabuhan bukan hanya sekadar perjanjian bisnis, tetapi mencakup aspek hukum publik dan privat, di mana negara tetap memiliki otoritas pengawasan meskipun sebagian fungsi layanan diberikan kepada pihak lain. Dalam hal ini, sistem akuntansi berbasis akrual yang digunakan mencerminkan fungsi negara sebagai principal yang tetap mengawasi dan mengelola pendapatan dari aktivitas konsesi sebagai bagian dari penerimaan negara.

Kaitannya dengan teori administrasi negara, sebagaimana dikemukakan oleh N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, konsesi merupakan bentuk pengalihan fungsi pelayanan dengan pengawasan melekat. Oleh karena itu, pencatatan dan pelaporan pendapatan dari kegiatan konsesi bukan hanya kewajiban teknis, tetapi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban publik dan pengelolaan aset negara yang harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi.

Dari sisi penelitian terdahulu, Riyan Darmawan dan Panubut Simorangkir (2022) menyoroti bahwa meskipun penyajian PSAP 16 telah dijalankan, masih terdapat kekurangan dalam rincian dokumen perjanjian. Hal ini relevan dengan kondisi di Belawan yang juga menghadapi tantangan pada aspek pengungkapan perjanjian secara lebih rinci. Temuan ini memperkuat perlunya peningkatan dokumentasi dalam sistem akuntansi konsesi.

Selanjutnya, temuan Amrie Firmansyah dan Sony Indra Baskoro (2020) mengenai akuntansi hak konsesi di jalan tol yang sudah sesuai standar, juga menegaskan bahwa informasi akuntansi yang sistematis sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kondisi serupa terjadi di pelabuhan Belawan, di mana sistem digital yang digunakan (SIMLALA dan SIMKAPEL) mendukung penyajian informasi akuntansi yang dapat digunakan secara strategis.

Dari sudut pandang pengakuan dan pengukuran, Regina Puti Jihan Prameswari (2024) menegaskan bahwa meskipun pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan ISAK 112, namun pengungkapan masih perlu ditingkatkan agar sesuai ISAK 229. Hal ini juga terjadi pada pengelolaan konsesi di pelabuhan, yang mengindikasikan perlunya penyempurnaan pada aspek transparansi laporan keuangan.

Gusnidar Suryam (2023) juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian konsesi, yang artinya setiap isi perjanjian harus dijalankan sebagaimana mestinya. Ini sesuai dengan praktik pengawasan berlapis yang diterapkan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, di mana tidak hanya internal tetapi juga BPK melakukan evaluasi atas pelaksanaan konsesi.

Akhirnya, dari sisi edukasi sistem akuntansi, Seprida Hanum (2017) menekankan pentingnya penggunaan media digital untuk meningkatkan pemahaman sistem. Hal ini telah diaplikasikan di pelabuhan melalui penggunaan aplikasi digital yang mempercepat proses pencatatan dan pelaporan, meskipun masih diperlukan integrasi penuh agar seluruh tahapan berjalan secara otomatis dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Khairul Fazli Sitompul, Muhyarsyah, dan Irfan (2020) mengenai sistem Host to Host sebagai alat pengendalian internal atas piutang di PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan menunjukkan bahwa sistem digital mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat proses pencatatan, dan menghasilkan informasi yang transparan dan dapat diandalkan.

Hal ini sejalan dengan sistem akuntansi pendapatan konsesi di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan yang menggunakan aplikasi digital seperti SIMLALA dan SIMKAPEL untuk mendukung akuntabilitas dan efisiensi pencatatan. Namun, keduanya juga menghadapi tantangan yang serupa, yaitu masih adanya hambatan seperti keterlambatan laporan dari mitra dan penggunaan dokumen fisik yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Selain itu, penelitian oleh Jumirin dan Yesika Lubis (2018) menekankan bahwa efisiensi biaya operasional berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan operasional, yang relevan dalam konteks pengelolaan pendapatan konsesi, di mana pengendalian biaya dan pencatatan yang sistematis sangat diperlukan untuk optimalisasi penerimaan negara. Kedua temuan ini memperkuat pentingnya penguatan sistem akuntansi dan pengendalian internal dalam mendukung pengelolaan pendapatan konsesi secara profesional dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Usaha & Jasa Kepelabuhanan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Proses pencatatan pendapatan konsesi dilakukan secara sistematis melalui tahapan verifikasi laporan mitra, penagihan, pencatatan pembayaran, dan pelaporan berkala kepada instansi pusat. Seluruh proses didukung oleh prosedur kerja yang jelas dan terstruktur.
2. Pendapatan konsesi berasal dari pemanfaatan lahan, penggunaan fasilitas pelabuhan, pengelolaan terminal penumpang, serta kegiatan lain oleh pihak ketiga di wilayah pelabuhan. Sistem pencatatan telah didukung oleh aplikasi digital seperti SIMLALA dan SIMKAPEL dari Kementerian Perhubungan, meskipun beberapa proses masih dilakukan secara semi-manual, terutama dalam penanganan dokumen fisik.
3. Sistem akuntansi yang diterapkan terbukti efektif dalam menunjang pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan manajemen. Proses ini melibatkan lintas bagian internal, termasuk tim teknis, keuangan, dan

auditor internal, serta mendapatkan pengawasan rutin dari pihak eksternal seperti BPK. Hal ini mencerminkan pengelolaan pendapatan konsesi yang akuntabel, transparan, dan profesional sesuai prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Disarankan agar seluruh proses pencatatan dan pelaporan pendapatan konsesi didigitalisasi sepenuhnya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.
2. Instansi sebaiknya rutin memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada mitra agar pelaporan lebih tepat waktu dan sesuai prosedur.
3. Pengawasan internal perlu ditingkatkan melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas bagian guna memastikan akuntabilitas dan kualitas pelaporan tetap terjaga.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Penelitian hanya melibatkan satu informan kunci dari internal institusi, sehingga belum mencakup sudut pandang dari mitra usaha atau lembaga

pengawas eksternal yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan konsesi.

2. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, sehingga hasil yang diperoleh lebih bersifat eksploratif dan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh Kantor Otoritas Pelabuhan di Indonesia.
3. Penelitian ini belum menggunakan instrumen kuantitatif untuk membandingkan efektivitas sistem akuntansi, sehingga belum mampu memberikan gambaran objektif secara numerik.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari sisi jumlah responden, teknik pengumpulan data yang lebih bervariasi, maupun penggunaan metode kuantitatif guna mengukur efektivitas dan efisiensi sistem secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 118-126.
- Al Akbar, R., Handayani, E., & Amalia, K. R. (2021). Kelayakan Transportasi Air Sungai Batanghari (Studi Kasus Angkutan Motor Ketek Di Desa Terusan Kabupaten Batanghari). *Jurnal Talenta Sipil*, 4(2), 137-144.
- Anjani, D. N., & Rofi'ah, S. (2024). Dampak Ketersediaan Infrastruktur Jalur Laut terhadap Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kota Bima. *Jurnal Mirai Management*, 9(3), 108-116.
- Apriella, I. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Asystasia, W. A., & Siregar, S. A. (2024). Pengaruh karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial dengan variabel moderasi ketidakpastian lingkungan dan desentralisasi pada PT. Karya Hevea Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1773-1786.
- Darmawan, R., & Simorangkir, P. (2022, April). Implementasi psap 16 tentang perjanjian konsesi jasa–pemberi konsesi kepelabuhanan studi kasus pada kantor otoritas pelabuhan utama tanjung priok. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 2, pp. 69-74).
- Dwiguna, J. A., Sukmadewi, R., & Haryanto, V. D. (2024). Peran Jasa Freight Forwarder Dalam Menunjang Kesuksesan Aktivitas Ekspor Melalui Transportasi Laut Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(2), 1083-1094.
- Hanum, S. (2017). Pemanfaatan Aplikasi Penggambar Diagram Alir (Flowchart) Sebagai Bahanajar Untuk Mata Kuliah Sistem Akuntansi Di Fakultas Ekonomi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Medan. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/10/02/2043/Perkembangan-Transportasi-Rilis-2-Oktober-2023.html>

<https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7307/pelabuhan-indonesia-terbaik-di-asia-tenggara?lang=1#:~:text=Laman%20ppid.dephub.,unit%20melayani%20angka%20laut%2C%20termasuk:>

I Made Arya Utama ,N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge yang disunting Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan.1993.

Muhajir, Noeng, 1996, Metodologi penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

M.M Van Praag, Algemeen Nederlands Administratief Recht, A. Jongbloed & Zoon, SGravenhage, 1950

Nasution, R. P. S. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Novianti, L., & Ali, K. (2023). Pendampingan Penerapan Sistem Akuntansi Kas Pada UMKM Di Nagori Silau Bayu. *INTEGRATIF: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 67-73.

PP No 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Pasal 1 No 30

PP No 69 Tahun 2011 tentang Kepelabuhanan

Rambe, S., & Lubis, H. Z. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 65-78.

Rozi, F., Sari, M., & Astuti, W. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengawasan Internal Dan Key Performance Indicators (KPI) Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Bekerja Sebagai Variabel Moderating Di Perum Perumnas Regional I Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 270-280.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

- Surur, N. A., Gunawan, W., & Sutrisno, B. (2022). Manajemen kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas IV Banda Naira dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 116-135.
- Sitompul, M. K. F., Muhyarsyah, M., & Irfan, I. (2019). Analisis Penerapan Sistem Host To Host Sebagai Alat Pengendalian Internal Atas Piutang Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan International Container Terminal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (Jakk)*, 2(2), 63-82.
- Jumirin, J., & Lubis, Y. (2018). Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional Pada Pt Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 162-177.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/07/12/2022

Nama Mahasiswa : AYU PRATIWI SINURAT
NPM : 1805170287
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 07/12/2022
Nama Dosen pembimbing¹⁾ : Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si.
Judul Disetujui²⁾ : Sistem Akuntansi Dalam Pendapatan Komisi Atas Jasa Kepelabuhanan
pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulfah Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 7 Desember 2022

Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga S.E., M.Si.)

Keterangan:

¹⁾ Dosen atau Program Studi

²⁾ Dosen atau Dosen Pembimbing

Setelah disetujui oleh Pihak dan Dosen Pembimbing, nomor agenda akan diupload ke sistem "Upload pengajuan judul online"



MAJELIS PENYIARAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Tinggi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 0743/KKAR/PT/2016/PT/PT/2016
Pusat Administrasi Jalan Muhiyar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6623400 - 6623407 Fax. (061) 6625476 - 6621003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id Elumsu@medan umsu@medan umsu@medan umsu@medan

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 1005/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 07 Desember 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Ayu Pratiwi Sinurat
N P M : 1805170287
Semester : XIV (Empat Belas)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Sistem Akuntansi Dalam Pendapatan Konsesi Atas Jasa
Kepelabuhanan Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan

Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar
Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Dikuarsa tanggal :
18 Maret 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1446 H
18 Maret 2025 M



Dekan

Dr. H. Murti, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Bertinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ayu Pratiwi Sinurat
NPM : 1805170287
Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Sistem Akuntansi Dalam Pendapatan Konsesi atas Jasa Kepelabuhanan Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latihan belahang di perbaiki	12/2 2025	f
Bab 2	feri di tambahkan. susunlah lagi variabel penelitian - tanggal konsep		f
Bab 3	- Definisi operasional - metode pengumpulan data	19/2 2025	f
Daftar Pustaka	ditambah dengan 10 referensi		f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- wawancara - studi dokumen		f
Persetujuan Seminar Proposal	f	7/2 2025	f

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, Februari 2025
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si.)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 02 Mei 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ayu Pratiwi Sinurat*
NPM : *1805170287*
Tempat / Tgl.Lahir : *-*
Alamat Rumah : *-*
Judul Proposal : *Sistem Akuntansi Dalam Pendapatan Konsesi Atas Jasa Kepelabuhan Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang & identifikasi</i>
Bab II	<i>Tambah teori, perbaiki kerangka konsep</i>
Bab III	<i>Perbaiki definisi operasional.</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar pustaka.</i>
Kesimpulan	☒ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, *02 Mei 2025*

TIM SEMINAR

Ketun

Assoc. Prof. Dr. *K. Zulhan Hanani, S.E., M.Si*

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Perubanding

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 02 Mei 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Pratiwi Sinurat
NPM : 1805170287
Tempat / Tgl.Lahir : -
Alamat Rumah : -
Judul Proposal : Sistem Akuntansi Dalam Pendapatan Konsesi Atas Jasa Kepelabuhan Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si*

Medan, 02 Mei 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. R. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Pembanding

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Pratiwi Sinurat
NPM : 1805170287
Dosen Pembimbing : Pandopotan Ritonga, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Sistem Akuntansi dalam Pendapatan Konsesi atas Jasa Kepelabuhanan Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	kapur bledug di paku	10/6/2025	f
Bab 2	keris di amirah dgn variable paku	1	f
Bab 3	Defensi apemex di paku	11/6/2025	f
Bab 4	di pakuhan Marie & pakuhan buat flow chart	11/9/2025	f
Bab 5	konsep & sama di paku		f
Daftar Pustaka	sitari dosen sd		f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ass, 11/9/2025	11/9/2025	f

Medan, Juli 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. H. Zulia Hanum, S.E., M.Si.

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Pandopotan Ritonga, S.E., M.Si.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, II
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : AYU PRATIWI SINURAT

NPM : 1805120287

Tempat,Tgl. Lahir : TANJUNG BALAI, 10 NO
VEMBER 2000

Program Studi : Akuntansi /

Alamat Mahasiswa : J.L. PURWOSABI 66 BAR
U NO - 5

Tempat Penelitian : KANTOR OTORITAS PELA
BUHAN UTAMA BELAWAN

Alamat Penelitian : J.L. DELI BELAWAN 1

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian,

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Riva s/Bar Harhap. SE, Msi, Ak)

Wassalam
Pemohon

(Ayu prahwi Sinurat)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN



ALAMAT :
JL. SUAR NO. 1, PELABUHAN
BELAWAN 29411

TELP : (061) 6941051

Fax : (061) 6941051
E-mail : otoritasbelawan@gmail.com
Home page : dephub.go.id/org/kopbelawan

Nomor : / / /OP.BLW-2025
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Izin Riset/ Penelitian

Belawan, 20 April 2025

Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera

Berdasarkan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1005/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 18 Maret 2025 Perihal Izin Riset Pendahuluan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa diberi izin untuk melakukan riset di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan 1 (Satu bulan) terhitung mulai **19 Maret 2025 s.d 20 April 2025** dengan data mahasiswa sbb :

Nama : Ayu Pratiwi Sinurat
Npm : 1805170287
Program Studi : Akuntansi
Semester : XIV (Empat Belas)
Judul TA : Sistem Akuntansi dalam Pendapatan Konsesi atas Jasa Kepelabuhanan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan

Dalam pelaksanaan riset, agar melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam hal kebutuhan data-data terkait dan apabila penelitiannya telah selesai agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar dokumen penelitian Sdri ke Bagian Tata Usaha.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan,


NURLAILI SE MM
NIP. 196902081992032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
4. Sdri. Ayu Pratiwi Sinurat.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN**



ALAMAT
JL. SUAR NO. 1, PELABUHAN
BELAWAN 20411

TELP : (061) 6941051

Fax : (061) 6941051
E-mail : otoritasbelawan@gmail.com
Home page : dephub.go.id/org/kopbelawan

Nomor : UM.002/6/20/OP.BLW-2025
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Belawan, 28 Juli 2025

Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera

Berdasarkan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 2301/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 28 Juli 2025 Perihal Menyelesaikan Riset.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi dengan data sbb :

Nama : Ayu Pratiwi Sinurat
Npm : 1805170287
Program Studi : Akuntansi
Semester : X (Eks)
Judul TA : Sistem Akuntansi dalam Pendapatan Konsesi atas Jasa Kepelabuhanan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan

Dengan ini disampaikan, bahwa benar mahasiswi tersebut telah melaksanakan penelitian di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. Setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian dan penulisan agar diberikan copy tulisan/hasil penelitian yang bersangkutan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan,



NURAILI, SE MM
NIP. 196902081992032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
4. Sdri. Ayu Pratiwi Sinurat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama	: Ayu Pratiwi Sinurat
Tempat dan Tanggal Lahir	: Tanjung Balai, 10 Noember 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Anak ke	: 2 dari 2 bersaudara
Alamat	: Jl. Purwosari Gg Baru No. 5
No. Telephone	: 0813-9425-2153
Email	: sinurat.ayu10@gmail.com

II. DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Amir Husin Sinurat, S.E
Pekerjaan	: PNS
Nama Ibu	: Nurlaili, S.E, M.M
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Jl. Purwosari Gg Baru No. 5
No. Telephone	: 0813-9755-6748
Email	: nurlaili0708@gmail.com

III. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar	: SD Wahidin Sudirohusodo (2006 - 2012)
Sekolah Menengah Tingkat Pertama	: SMP Wahidin Sudirohusodo (2012 - 2015)
Sekolah Menengah Tingkas Atas	: SMA Negeri 4 Medan (2015 - 2018)
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) (2018 - 2025).

Medan, July 2025

(Ayu Pratiwi Sinurat)